

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau tahun 2020 dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggung jawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Secara lengkap LKJIP memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Secara sistematis, laporan ini merupakan rangkaian dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikitisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RKPD Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2016-2021. LKjIP ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi seluruh stakeholders mengenai pencapaian Diskoperindag Kabupaten Berau.

Secara umum kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau telah banyak memberikan hasil yang bisa dinikmati masyarakat, namun kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki, semoga ditahun yang akan datang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan serta partisipasi dalam rangka penyusunan LKjIP Diskoperindag Kabupaten Berau tahun 2020 ini.

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Tanjung Redeb, Mei 2021

Plt. Kepala Dinas,

Drs. SALIM

Pembina Utama Muda/ IVC

NIP. 19621227 199003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKJIP sebagai laporan yang memuat perbandingan antara perencanaan dan hasil dari kinerja pemerintah daerah, secara sistematis menjabarkan rangkaian dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana setiap Instansi/Lembaga Pemerintah daerah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan public. LKjIP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RPJMD 2016-2021 yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

Sebagaimana sasaran strategis yang tertuang dalam RENSTRA Diskoperindag Kabupaten Berau tahun 2016-2021, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2020 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 12.779.910.000 yang terbagi dalam 13 (tiga belas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan. Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 73,84% sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. **12.532.101.924,00**. Pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala kategori penilaian **Baik**.

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. 1.363.896.000,- dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp.1.229.307.293,00 dengan persentase 90,13%, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal dinas dengan sasaran strategis tersedianya data pegawai dan data aset.

Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yang ada. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu kami sudah melakukan upaya

antisipasi agar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang capaian kinerja dapat tercapai dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini sangat penting bagi Diskoperindag Kabupaten Berau untuk melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggung jawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap LKJIP memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Secara sistematis, laporan ini merupakan rangkaian dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikitisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan LKJIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan LKJIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD. Penyelenggaraan LKJIP meliputi: rencana strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; dan reviu dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Koperindag Kabupaten Berau.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperindag Kabupaten Berau adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Berau. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Berau.

1.3 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Dinas merupakan unsur pelaksana bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- d) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e) Pelaksanaan UPTD;
- f) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang diatur dalam Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

- Sub Bagian Penyusunan Program;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah membawahi:

- Seksi Pemberdayaan Koperasi;
- Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi;
- Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

d. Bidang Perindustrian, membawahi:

- Seksi Agro dan Hasil Hutan;
- Seksi Kimia, Logam dan Mesin;
- Seksi Elektronik dan Aneka;

e. Bidang Bina Usaha Perdagangan, membawahi:

- Seksi Perdagangan Dalam Negeri ;
- Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi;

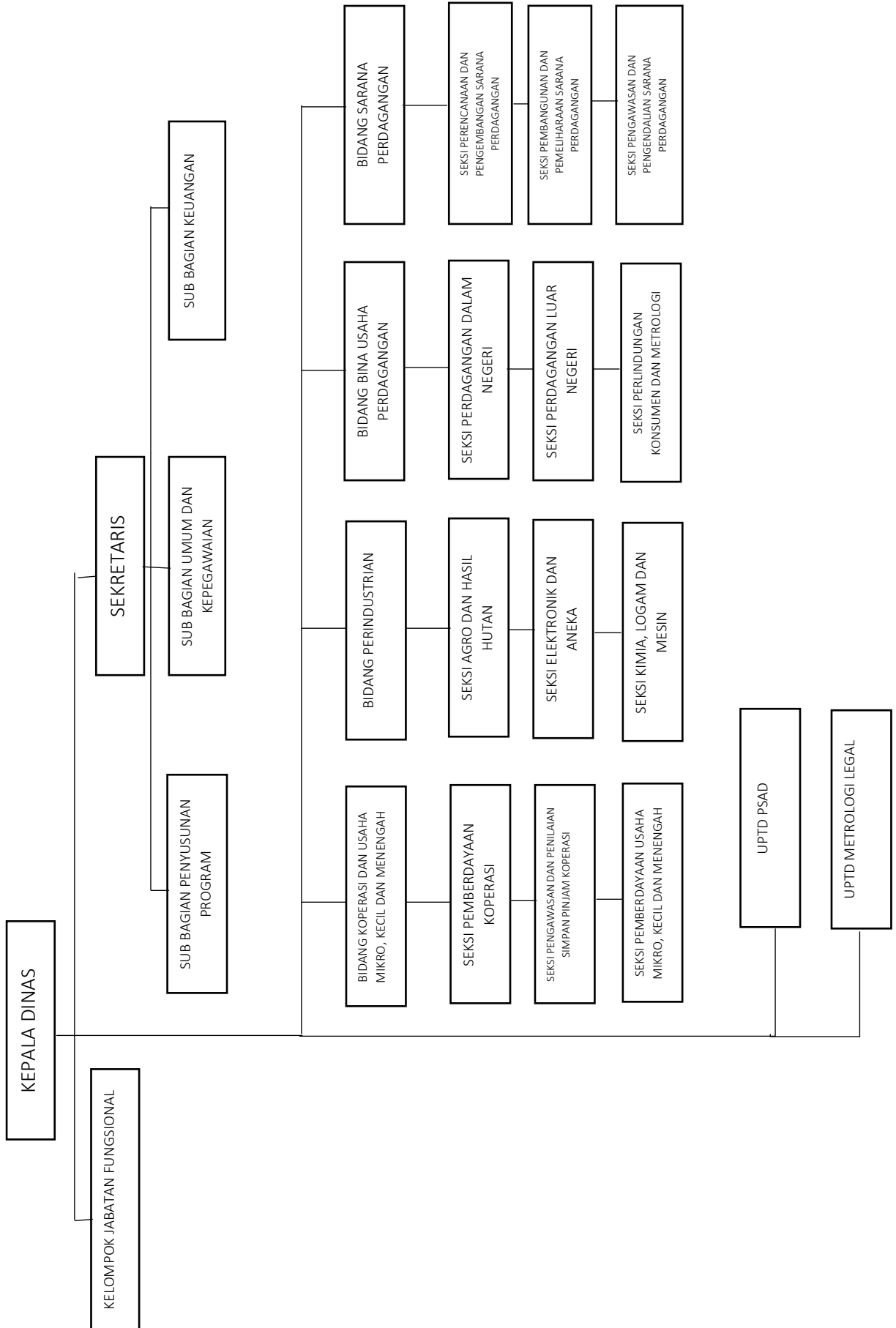
f. Bidang Sarana perdagangan, membawahi:

- Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan;
- Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan;
- Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;

g. UPTD

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
 Struktur Organisasi
 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten Berau



1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis wajib memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan mengalami permasalahan-permasalahan antara lain:

1. Permasalahan utama Bidang Industri: Belum berkembangnya industri kreatif

Keberhasilan industri akan sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di suatu daerah. Peningkatan sektor industri dapat dilakukan melalui peningkatan industri kreatif, yang ditujukan demi pemereratnya kapasitas industri suatu daerah, lebih tepatnya industri-industri yang memiliki sifat kompetitif unggulan. Dibuatnya rencana meningkatkan sektor industri bisa mengembangkan penghasilan para pemilik serta karyawan industri itu sendiri, dan tak lupa menetapkan struktur industri di pelosok desa agar bisa memberikan suatu nilai lebih untuk desa tersebut. Dari bidang Industri tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang Industri: Belum optimalnya pengembangan Industri

| Permasalahan | Akar Masalah |
|--|--|
| Belum optimalnya pengembangan industri | Rendahnya ketrampilan pelaku industri |
| | Kurangnya penerapan teknologi dalam pengembangan IKM |

2. Permasalahan utama Bidang Perdagangan: Masih rendahnya nilai ekspor

Daya saing merupakan salah satu kriteria yang menentukan keberhasilan suatu daerah di dalam perdagangan nasional. Nilai ekspor yang semakin menurun mengindikasikan bahwa daya saing Kabupaten Berau di perdagangan nasional semakin menurun. Kekayaan alam yang melimpah sepertinya kurang berperan dalam peningkatan daya saing Kabupaten Berau. Demikian sebaliknya, jika daya saing meningkat hal ini mengindikasikan bahwa produk lokal Kabupaten Berau memiliki kualitas unggulan sehingga mendapat pasar nya sendiri di luar kabupaten. Dari bidang Perdagangan tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang Perdagangan:
Masih rendahnya daya saing produk ekspor

| Permasalahan | Akar Masalah |
|--|--|
| Masih rendahnya daya saing produk ekspor | Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga |
| | Belum Optimal nya perlindungan konsumen |
| | Masih Rendahnya Kualitas dari produk lokal yang diekspor |

3. Permasalahan utama Bidang Koperasi Dan UMKM: Koperasi dan UMKM belum menjadi pelaku utama dalam perekonomian daerah

Koperasi merupakan lembaga yang seharusnya menjadi roda penggerak utama dalam perekonomian suatu daerah. Namun di Kabupaten Berau, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan Koperasi dan UMKM belum dapat berfungsi demikian. Hal ini dikarenakan belum adanya produk-produk lokal daerah yang berkualitas yang dapat dipromosikan menjadi produk unggulan daerah. Serta dari segi modal, UMKM kesulitan dalam hal permodalan sehingga kurang berkembang. Dari bidang Koperasi dan UMKM tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang Koperasi Dan UMKM:
Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui lembaga koperasi

| Permasalahan | Akar Masalah |
|--|--|
| Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui lembaga koperasi | Diversifikasi produk UKM masih terbatas |
| | fasilitas permodalan belum maksimal |
| | Kurangnya promosi produk-produk UMKM |
| | Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) |

1.5 Sistematika Penyusunan Laporan

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2017 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

b. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA
BERKELANJUTAN**

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

- 1) Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- 2) Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

- 3) Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
- 4) Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Berau mengikuti misi kedua yaitu **Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.** Dinas Koperindag perlu membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan misi kedua tersebut. Di dalam misi tersebut terdapat indikator laju pertumbuhan ekonomi, Dinas Koperindag memiliki kontribusi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi karena salah satu sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan dan perindustrian, baik perindustrian besar maupun kecil menengah.

2.2 Penetapan Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan strategik dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta Koperasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah
Sasaran:
-
1. Meningkatkan Peran serta UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah

2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat, agen distributor dan pelaku usaha
3. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap pengembangan perekonomian daerah

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperindag Kabupaten Berau
Pada Rencana Strategis 2016-2021

Men

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN |
|----|--|--|---|
| 1 | Meningkatkan Peran Serta Koperasi dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah | | |
| | | Meningkatnya Koperasi yang Sehat dan Akuntabel | Presentase Koperasi Aktif |
| | | | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi |
| | | Meningkatnya Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan |
| | | | Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian |
| 2 | Meningkatkan Peran Serta UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah | | |
| | | | Presentase UMKM Aktif |
| | | Meningkatnya Produktifitas, nilai tambah, Akses pasar, dan Akses Pembiayaan UMKM | Presentase Usaha mikro dan kecil |
| | | | Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro |
| | | | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran |
| | | | Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan |
| 3 | Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Barang penting bagi Masyarakat, Agen Distributor dan Pelaku Usaha | | |
| | | Meningkatnya Pendapatan dari sektor Perdagangan | Presentase Eksportir Baru yang Menggunakan SKA |
| | | Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal |
| | | | Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting |
| | | Meningkatnya Perlindungan Konsumen di Seluruh Wilayah Kabupaten | Presentase Peningkatan jumlah konsumen yang dilayani melalui Tera/Tera Ulang |
| | | Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan | Presentase sarana distribusi perdagangan yang aktif |
| 4 | Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap pengembangan perekonomian daerah | | |
| | | Meningkatnya Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Presentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin |
| | | | Presentase Pengendalian Izin Usaha Industri terhadap jumlah Industri yang terdata |
| | | | Presentase Pengawasan terhadap industri Kecil menengah |

Sumber : Renstra Diskoperindag Kab. Berau
Review tahun 2020

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun strategi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

| Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | | | | |
|---|--|--|--|---|
| "Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan" | | | | |
| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| | Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal | | | |
| 1 | Meningkatkan Peran Serta Koperasi dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah | Meningkatnya Koperasi yang Sehat dan Akuntabel Meningkatnya Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi | Peningkatan Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Perkoperasian Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Koperasi | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Manajemen Koperasi |
| 2 | Meningkatkan Peran Serta UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah | Meningkatnya Produktifitas, nilai tambah, Akses pasar, dan Akses Pembiayaan UMKM | Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM Peningkatan sarana promosi produk daerah | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah |
| 3 | Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Barang penting bagi Masyarakat, Agen Distributor dan Pelaku Usaha | Meningkatnya Pendapatan dari sektor Perdagangan Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Meningkatnya Perlindungan Konsumen di Seluruh Wilayah Kabupaten Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan | Peningkatan aktifitas perdagangan lokal Peningkatan Monitoring stok dan harga barang kebutuhan pokok Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen Peningkatan Pemeliharaan sarana dan Sarana perdagangan | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri |
| 4 | Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap pengembangan perekonomian daerah | Meningkatnya Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Meningkatnya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri |

Ganti:**1) Industri berbasis sumber daya lokal**

Kompetisi global yang semakin meningkat, mewajibkan setiap negara untuk mampu meningkatkan keunggulan kompetitifnya agar dapat bersaing dengan negara lain melalui penguatan daya saing industri yang memiliki kemampuan manajemen yang efisien, Optimalisasi industri dapat memunculkan banyak produk yang berkualitas di pasaran dengan harga yang bersaing. Semakin bagus mutu barang dan harganya yang terjangkau oleh masyarakat, maka produk lokal dapat bersaing sehat dengan barang impor yang sejenis. Daya saing produk industri dapat memunculkan banyak produk yang berkualitas di pasaran dengan harga yang bersaing. Semakin bagus mutu barang dan harganya yang terjangkau oleh masyarakat, maka produk lokal dapat bersaing sehat dengan barang impor yang sejenis.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal
- Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2) Peningkatan Aktifitas Perdagangan Lokal

Diversifikasi pasar dapat meningkatkan komoditas ekspor Kabupaten Berau. Produk-produk ekspor haruslah dapat dipilih oleh target pasaran sehingga mereka tidak terpaku hanya pada satu jenis komoditas melainkan komoditas tersebut mempunyai komoditas sejenis yang merupakan hasil inovasi dari produsen. Hal ini penting dilakukan mengingat suksesnya sebuah rantai perekonomian adalah tingkat kepuasan target pasaran produk. Kebijakan ekspor pada awalnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh sumber daya yang ada di dalam negeri serta untuk mengeratkan hubungan dengan negara. Kemudian berkembang menjadi alat untuk menunjukkan eksistensi negara di dunia internasional. Kabupaten Berau perlu mengembangkan sumberdaya lokal yang dapat dijadikan komoditi ekspor Kabupaten Berau.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatkan kinerja ekspor non migas Berau.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- Peningkatan aktifitas perdagangan local
- Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen

3) Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia Koperasi dan UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting. Hal ini dikarenakan sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Daya saing Koperasi dan UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian daerah, oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian hasil-hasil pembangunan. Pemberian peran terhadap usaha skala mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu langkah mengembangkan dan mengoptimalkan potensi perekonomian Indonesia sehingga mampu mengangkat citra perekonomian rakyat.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatkan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi
- Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM
- Peningkatan sarana promosi produk daerah
- Pembinaan dan peningkatan manajemen koperasi

4) Peningkatan kapasitas kelembagaan

Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berpengaruh pada upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria *good governance*. Salah satu variabel yang dianggap penting dalam proses pengembangan kapasitas kelembagaan adalah mengembangkan pola struktur

organisasi, karena struktur organisasi berkaitan dengan pembagian tugas yang dapat menjadikan organisasi yang efisien, efektif dan solidaritas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- Peningkatan sarana prasarana dan standar operasional kantor
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|--|
| Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian | Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Optimalisasi Industri berbasis sumber daya lokal | Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal |
| | | | Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan | Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau | Peningkatan Diversifikasi pasar dan Produk Ekspor | peningkatan aktifitas perdagangan lokal |
| | | | Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | peningkatan promosi produk komoditi daerah |
| Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah | Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM | Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM | Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi |
| | | | Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM |
| | | | Peningkatan sarana promosi produk daerah |
| | | | Pembinaan dan peningkatan manajemen koperasi |
| | | Peningkatan kapasitas kelembagaan | Peningkatan sarana prasarana dan standar operasional kantor |
| | | | Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan |

2.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program yang hendak dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Penyusunan kegiatan tahun anggaran 2019 adalah penjabaran dari pada program Diskoperindag Kabupaten Berau yaitu: Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan, Diskoperindag Kabupaten Berau menetapkan 11 (Sebelas) program dan 41 (Empat Puluh satu) Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
 - Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Sosialisasi Kinerja Program SKPD
 - Konsolidasi Perencanaan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 - Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.
- Fasilitasi Kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (CEFE)
5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Pengembangan UMKM
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

- Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
 - Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 - Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi.
7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
 - Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah
 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Tentang Perlindungan Konsumen
 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
 - Forum Komunikasi SKA Bidang Perdagangan Luar Negeri
 9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
 - Operasional Pasar
 - Pelaksanaan Pasar Murah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar
 - Pengembangan Pasar dan distribusi Barang/produk (DAK)
 10. Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah.
 - Fasilitas Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
 - Fasilitasi Sertifikasi Halal
 - Dekranasda.
 11. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

2.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, seperti dijabarkan pada tabel berikut :

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2016-2021

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | ALASAN | PENJELASAN / PERHITUNGAN | DATA TAHUN AWAL 2016 | Target Akhir Tahun 2021 |
|----|---|---|--------|---|---|----------------------|-------------------------|
| 1 | Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang di kembangkan | IKM | Mengukur perkembangan industri berbasis sumber daya local | IKM didapat dari update data jumlah IKM yang terdaftar setiap tahun | 880 IKM | 1200 IKM |

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------|---|--|---------|---------|
| | | Jumlah IKM yang Menggunakan Teknologi Industri | IKM | Mengukur perkembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | IKM didapat dari update data jumlah IKM yang terdata menggunakan teknologi industri setiap tahun | 461 IKM | 600 IKM |
| | | Jumlah Industri Kreatif | IKM | Mengukur Perkembangan industry kreatif | IKM didapat dari data dilapangan jumlah industry kreatif | 76 | 160 |
| 2 | Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat | USD | Mengukur peningkatan aktifitas perdagangan | Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Berau | 136,16 | 170 |
| | | PDRB Kab. Berau dari Sektor Perdagangan | % | Mengukur peningkatan aktifitas perdagangan | Peningkatan Nilai Kontribusi sektor perdagangan | 5,9 | 6,2 |
| 3 | Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah | Jumlah Wira Usaha yang Memiliki Keunggulan Kompetitif (UMKM) | Nilai | mengukur Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi | jumlah didapat dari data wirausaha yang memiliki keunggulan kompetitif setiap tahun | 192 | 300 |
| | | Jumlah UMKM yang dibina (UMKM) | Nilai | Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM | jumlah di dapat dari data UMKM yang diberi bantuan dan binaan modal setiap tahun | 24 | 150 |
| | | Jumlah Koperasi Berprestasi | Koperasi | Peningkatan jumlah koperasi berprestasi | Jumlah di dapat dari Data Koperasi yang melakukan RAT setiap tahun | 31 | 50 |

2.6 Penetapan Kinerja

Dengan didukung oleh sejumlah program dan kegiatan, selanjutnya dibuat Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melalui Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2019 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta Target yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.4
 PERJANJIAN KINERJA
 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BERAU
 TAHUN 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | Target |
|----|---|--|--------|---------|
| 1 | Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang di kembangkan | IKM | 900 IKM |
| | | Jumlah IKM yang Menggunakan Teknologi Industri | IKM | 480 IKM |
| | | Jumlah Industri Kreatif | IKM | 140 |
| 2 | Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat | USD | 160 |
| | | PDRB Kab. Berau dari Sektor Perdagangan | % | 4,0 |
| 3 | Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah | Jumlah Wira Usaha yang Memiliki Keunggulan Kompetitif (UMKM) | UMKM | 230 |
| | | Jumlah UMKM yang dibina (UMKM) | UMKM | 90 |
| | | Jumlah Koperasi Berprestasi | Kop | 40 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja tahun 2019

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan UMKM yang dijabarkan dalam 11

(dua belas) Program dan 41 (empat puluh satu) Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Anggaran

| No | Program dan Kegiatan | Anggaran |
|----------|---|-------------------------|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.553.339.800,00 |
| | 1) Penyediaan jasa surat menyurat | 3.500.000,00 |
| | 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 161.500.000,00 |
| | 6) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 116.043.800,00 |
| | 7) Penyediaan jasa administrasi keuangan | 174.156.000,00 |
| | 8) Penyediaan jasa kebersihan kantor | 8.500.000,00 |
| | 9) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 10.000.000,00 |
| | 10) Penyediaan alat tulis kantor | 22.500.000,00 |
| | 11) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 15.000.000,00 |
| | 12) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 4.000.000,00 |
| | 13) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 20.000.000,00 |
| | 14) Penyediaan Peralatan rumah tangga | 5.600.000,00 |
| | 15) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 8.000.000,00 |
| | 17) Penyediaan makanan dan minuman | 31.000.000,00 |
| | 18) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 300.000.000,00 |

| | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|
| | 19) | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 100.000.000,00 |
| | 20) | Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran | 573.540.000,00 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 5.000.000,00 |
| | 22) | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 5.000.000,00 |
| 6 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 182.634.000,00 |
| | 1) | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5.000.000,00 |
| | 10) | Konsolidasi Perencanaan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 157.634.000,00 |
| | 12) | Sosialisasi Kinerja Program OPD | 20.000.000,00 |
| 15 | Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif | | 116.000.000,00 |
| | 3) | Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah | 116.000.000,00 |
| 15 | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | | 295.000.000,00 |
| | 4) | Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah | 295.000.000,00 |
| 16 | Program pengembangan industri kecil dan menengah | | 865.000.000,00 |
| | 1) | Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya | 150.000.000,00 |
| | 7) | Fasilitasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) | 600.000.000,00 |
| | 8) | Fasilitasi Sertifikasi Halal | 115.000.000,00 |
| 16 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | | 590.000.000,00 |
| | 6) | Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan | 590.000.000,00 |

| | | | |
|---------------|--|---|--------------------------|
| 17 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | | 316.500.000.00 |
| | 5) | Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 50.000.000.00 |
| | 9) | Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah | 66.500.000.00 |
| | 12) | Pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah | 200.000.000.00 |
| 17 | Program peningkatan dan pengembangan ekspor | | 87.984.000.00 |
| | 13) | Forum Komunikasi SKA bidang perdagangan Luar Negeri | 81.984.000.00 |
| 17 | Program peningkatan kemampuan teknologi industri | | 290.000.000.00 |
| | 1) | Pembinaan kemampuan teknologi industri | 290.000.000.00 |
| 18 | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | | 16.478.119.000.00 |
| | 3) | Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK) | 4.481.811.000.00 |
| | 9) | Pelaksanaan Pasar Murah | 2.100.000.000.00 |
| | 10) | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | 161.950.000.00 |
| | 11) | Operasional Pasar | 7.254.000.000.00 |
| | 12) | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar | 1.280.358.000.00 |
| | 14) | Pembangunan Pasar Rakyat | 1.200.000.000.00 |
| 18 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | | 450.000.000,00 |
| | 4) | Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian | 100.000.000.00 |
| | 5) | Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi | 350.000.000.00 |
| Jumlah | | | 21.229.576.800,00 |

a. Program Prioritas dan Realisasi Tahun 2019 berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melaksanakan Program Prioritas yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang dapat dilihat pada tabel 2.2 Program Prioritas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program Prioritas Tahun 2019

| No | Program Prioritas (RPJMD) | Indikator Kinerja (outcome) | Target Kinerja | | OPD | Realisasi |
|----|------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|-----------|
| | | | 2019 | 2021 | | 2019 |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|---------------|-----|
| | | | | | | |
| 1 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (Jumlah Industri Kecil Menengah yang di kembangkan) | 900 | 1200 | Diskoperindag | 991 |
| | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB | 4,0 | 5,55 | Diskoperindag | 4,2 |
| | | | | | | |

b. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan DPPA Tahun 2019

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2019 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 21.229.567.800,00 yang terbagi dalam 12 (sebelas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan. Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 82,10% sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. **17.429.444.889,00**. Pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala kategori penilaian **Sangat Baik**.

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program dan kegiatan beserta capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. 1.553.339.800,- dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp.1.486.286.056,00 dengan persentase 95,68%, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal dinas dengan sasaran strategis tersedianya data

pegawai dan data aset. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal dinas yang dapat dilihat pada tabel 3.3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

| No. | Kegiatan | Anggaran | | Capaian (%) | Keluaran | | Capaian (%) |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Pagu | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 3.500.000 | 2.967.500 | 84,79 | 200 surat keluar | 216 surat keluar | 108 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 161.500.000 | 153.475.476 | 95,03 | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 116.043.800 | 97.973.211 | 84,43 | 21 unit | 14 unit | 66.67 |
| 4 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 174.156.000 | 166.776.000 | 95,76 | 21 orang | 21 orang | 100 |
| 5 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 8.500.000 | 7.630.000 | 89,77 | 10 jenis | 12 jenis | 120 |
| 6 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 10.000.000 | 9.999.500 | 100 | 10 jenis | 9 jenis | 90 |
| | Penyediaan alat tulis kantor | 22.500.000 | 22.499.000 | 100 | 20 jenis | 18 jenis | 90.00 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------|----------|----------|-------|
| 8 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 15.000.000 | 14.997.600 | 99,98 | 3 jenis | 3 jenis | 100 |
| 9 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4.000.000 | 2.719.000 | 67,98 | 4 jenis | 4 jenis | 100 |
| 10 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 20.000.000 | 17.350.000 | 86,75 | 5 unit | 5 unit | 99,38 |
| 11 | Penyediaan Perlengkapan rumah tangga | 5.600.000 | 5.298.000 | 94,61 | 5 jenis | 5 jenis | 100 |
| 11 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 8.000.000 | 7.920.000 | 99,00 | 2 bacaan | 2 bacaan | 100 |
| 12 | Penyediaan makanan dan minuman | 31.000.000 | 25.653.000 | 82,75 | 2 jenis | 2 jenis | 100 |
| 13 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 300.000.000 | 298.576.319 | 99,53 | 26 kali | 34 kali | 130 |
| 14 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 100.000.000 | 93.200.000 | 93,20 | 80 kali | 121 Kali | 151 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------|----------|----------|-----|
| 15 | Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran | 573.540.000 | 559.250.950 | 97,51 | 14 orang | 14 orang | 100 |
|----|--|-------------|-------------|-------|----------|----------|-----|

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp. 182.634.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 174.946.016,00 dengan persentase 95,79%, yang bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan, perencanaan program, pelaporan dengan output yang dihasilkan terdiri dari Renja 2019, RKA, DPA, LKj-IP, LPPD, dan Perjanjian Kinerja.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan program dan pelaporan capaian kinerja yang berkualitas dengan manfaat yang diperoleh terpenuhinya dokumen perencanaan program dan pelaporan capaian kinerja sehingga tersedianya laporan dan realisasi SKPD yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

| No. | Kegiatan | Anggaran | | Capaian (%) | Keluaran | | Capaian (%) |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5.000.000 | 4.975.500 | 99,51 | 6 dok | 6 dok | 100 |
| 2 | Konsolidasi perencanaan Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan | 157.634.000 | 149.970.516 | 95,14 | 15 kali | 18 kali | 120 |
| 3 | Sosialisasi Kinerja Program OPD | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 | 1 Paket | 1 Paket | 100 |

3. Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif

Pelaksanaan Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang kondusif yang dianggarkan sebesar Rp. 116.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.113.396.860,00 dengan persentase 97,76 %, Target kinerja kegiatan ini adalah memberikan fasilitas kepada 60 UKM yang ada di Kabupaten Berau untuk kemudahan pembuatan Izin Usaha.

Sampai dengan 31 Desember 2019 target tersebut tercapai sebesar 112%. Sosialisasi dilakukan ke 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Pulau Derawan, Sambaliung dan Gunung Tabur, dimana masing-masing Kecamatan dihadiri oleh sedikitnya 20 UMKM yang ada, sehingga total UMKM yang difasilitasi adalah 132 UMKM. yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.5 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif sebagai berikut :

Tabel 3.5
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

| No. | Kegiatan | Anggaran | | Capaian (%) | Keluaran | | Capaian (%) |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah | 116.000.000 | 113.396.860 | 97,76 | 24 UMKM | 30 UMKM | 125 |

4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang dianggarkan sebesar Rp.590.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.536.156.929,00 dengan persentase 90,87% yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang terfokus pada pelatihan Wirausaha dan Pembentukan Badan Usaha, mulai dari Perencanaan, Akses Permodalan, Pembuatan Proposal Permodalan, Prosedur dan Tata Kerja Administrasi dan Akuntansi Wirausaha dll. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal bulan Maret 2019 di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, Jalan Murjani I Tanjung Redeb.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 24 UKM di Kabupaten Berau, dan target tersebut tercapai sepenuhnya (100%) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

| No. | Kegiatan | Anggaran | | Capaian (%) | Keluaran | | Capaian (%) |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan | 590.000.000 | 536.156.929 | 90,87 | 24 UMKK | 24 UMKM | 100 |

5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang dianggarkan sebesar Rp.316.500.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.110.694.636,00 dengan persentase 34,97% yang bertujuan untuk memberikan dukungan pendanaan/modal dan sarana promosi bagi UMKM di Kabupaten Berau. Dengan target capaian sebanyak 100 UMKM Kegiatan ini mencapai 94%.

Program ini mencakup 3 kegiatan yang saling mendukung dan bersinergi guna mewujudkan pencapaian target kinerja yang diinginkan. Kegiatan ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.7 Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

| No. | Kegiatan | Anggaran | Capaian | Keluaran | Capaian |
|-----|----------|----------|---------|----------|---------|
|-----|----------|----------|---------|----------|---------|

| | | Target | Realisasi | (%) | Target | Realisasi | (%) |
|---|---|-------------|------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 1 | Pemantauan Pengelolaan dana Pemerintah Bagi UMKM | 50.000.000 | 27.112.330 | 54,22 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2 | Penyelenggaraan promosi Produk UMKM | 66.500.000 | 66.377.801 | 99,82 | 15 Produk | 26 Produk | 173,3 |
| 3 | Penge mbangan UMKM | 200.000.000 | 17.204.505 | 8,60 | 30 UMKM | 24 UMKM | 80 |

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.320.454.000,00 dengan persentase 71,21% yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Lembaga koperasi di Kabupaten Berau melalui pencapaian RAT koperasi Dengan target capaian sebanyak 76 koperasi.

Adapun sasaran pada program ini adalah meningkatkan angka koperasi yang berhasil RAT pada akhir tahun 2019, dari 80 koperasi yang ditargetkan RAT, angka yang di capai pada akhir tahun adalah sebanyak 76 koperasi. Capaian kinerja program ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi sebagai berikut :

Tabel 3.8

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

| No. | Kegiatan | Anggaran | | Capaian (%) | Keluaran | | Capaian (%) |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian | 100.000.000 | 78.122.250 | 78,12 | 24 Koperasi | 24 Koperasi | 100 |
| 2 | Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi | 350.000.000 | 242.331.750 | 69,24 | 80 Koperasi | 76 Koperasi | 95 |

7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan yang dianggarkan sebesar Rp.295.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.210.989.993,00 dengan persentase 71,52% yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang terhadap 1.440 alat UTTP. Kegiatan ini mencapai lebih dari 100% dengan pelaksanaan tera dan tera ulang yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai lebih dari 1.440 alat UTTP yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.9 Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

| No. | Kegiatan | Anggaran | | Capaian (%) | Keluaran | | Capaian (%) |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Operasionaslisasi dan pengembangan UPTD Kemetrollogian Daerah | 295.000.000 | 210.989.993 | 71,52 | 1.440 alat UTTP | 1.440 alat UTTP | 100 |

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor yang dianggarkan sebesar Rp.87.984.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.81.229.414,00 dengan persentase 92,32% yang bertujuan untuk meningkatkan angka ekspor komoditas dan meningkatkan angka investasi yang ditanamkan di Kabupaten Berau.

Sasaran dari program ini adalah terselesaikannya laporan PEPIDA dan terlaksananya Forum Komunikasi SKA bidang perdagangan luar negeri. Kedua sasaran yang diakomodir dalam dua kegiatan ini terlaksana seluruhnya (100%) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.10 Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 3.10

Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

| No. | Kegiatan | Anggaran | | Capaian (%) | Keluaran | | Capaian (%) |
|-----|---|------------|------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Forum Komunikasi SKA bidang perdagangan luar negeri | 87.984.000 | 81.229.414 | 92,32 | 3 Rakor | 3 Rakor | 100 |

9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang dianggarkan sebesar Rp.16.478.119.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.13.002.082.654,00 dengan persentase 78,91% yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada sarana perdagangan di Kabupaten Berau. Sasaran dari program ini adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana di pasar-pasar pada 13 Kecamatan di Kabupaten Berau, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.11 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri sebagai berikut :

Tabel 3.11

| No. | Kegiatan | Anggaran | | Capaian (%) | Keluaran | | Capaian (%) |
|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk (DAK) | 4.481.811.000 | 3.897.147.414 | 86,95 | 2 Pasar | 2 Pasar | 100 |
| 2 | Pelaksanaan Pasar Murah | 2.100.000.000 | 99.856.885 | 4,76 | 8 Kecamatan | 9 Kecamatan | 113 |
| 3 | Peningkatan Sistem Jaringan | 161.950.000 | 133.732.729 | 82,58 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------|---------|---------|-----|
| 4 | Informasi Perdagangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Operasional | 1.280.358.000 | 1.117.604.452 | 87,29 | 2 pasar | 2 pasar | 100 |
| 5 | Pasar | 7.254.000.000 | 6.782.316.748 | 93,50 | 2 pasar | 2 pasar | 100 |
| 6 | Pembangunan Pasar Rakyat | 1.200.000.000 | 971.424.426 | 80,95 | 1 Pasar | 1 Pasar | 100 |

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

10. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah yang dianggarkan sebesar Rp.865.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.730.894.712,00 dengan persentase 84,50% yang bertujuan untuk kualitas dan daya saing Industri kecil dan Industri menengah yang ada di Kabupaten Berau. Sasaran dari program ini adalah terlaksananya fasilitasi bagi industri kecil menengah dalam promosi produk dan peningkatan daya saing yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.12 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

| No. | Kegiatan | Anggaran | | Capaian (%) | Keluaran | | Capaian (%) |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya | 150.000.000 | 129.781.216 | 86,52 | 15 IKM | 15 IKM | 100 |
| 2 | Fasilitasi Dekranasda | 600.000.000 | 541.938.496 | 90,32 | 5 Produk | 10 Produk | 200 |
| 3 | Fasilitasi Sertifikasi Halal | 115.000.000 | 59.175.000 | 51,46 | 12 IKM | 12 IKM | 100 |

11. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang dianggarkan sebesar Rp.290.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.286.875.100,00 dengan persentase 98,92% yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung peningkatan pemasaran bagi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Berau. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kemampuan IKM binaan dalam penggunaan teknologi industri, serta Kemasan yang memadai dan menunjang kegiatan pemasaran industri kecil menengah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.13 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri sebagai berikut :

Tabel 3.13
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

| No. | Kegiatan | Anggaran | | Capaian (%) | Keluaran | | Capaian (%) |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri | 290.000.000 | 286.875.100 | 98,92 | 10 IKM | 12 IKM | 120 |

c. Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2019 berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melaksanakan Program Prioritas yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran Strategis ini dicapai melalui dua program prioritas. Program Prioritas yang Pertama Yaitu Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.14 Program Prioritas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun 2019 dengan realisasi sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Capaian Program/Kegiatan Prioritas Industri Tahun 2019
Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

| No. | Kegiatan | Anggaran | | Capaian (%) | Keluaran | | Capaian (%) |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya | 150.000.000 | 129.781.216 | 86,52 | 15 IKM | 15 IKM | 100 |
| 2 | Fasilitasi Dekranasda | 600.000.000 | 541.938.496 | 90,32 | 5 Produk | 10 Produk | 200 |
| 3 | Fasilitasi Sertifikasi Halal | 115.000.000 | 59.175.000 | 51,46 | 12 IKM | 12 IKM | 100 |

Program Prioritas yang Kedua yaitu Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.15 Program Prioritas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun 2019 dengan realisasi sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 3.15
Realisasi Capaian Program/Kegiatan Prioritas Perdagangan Tahun 2019
Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

| No. | Kegiatan | Anggaran | | Capaian (%) | Keluaran | | Capaian (%) |
|-----|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk (DAK) | 4.481.811.000 | 3.897.147.414 | 86,95 | 2 Pasar | 2 Pasar | 100 |
| 2 | Pelaksanaan Pasar Murah | 2.100.000.000 | 99.856.885 | 4,76 | 8 Kecamatan | 9 Kecamatan | 113 |
| 3 | Peningkatan Sistem Jaringan Informasi | 161.950.000 | 133.732.729 | 82,58 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
| 4 | Perdagangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Operasional | 1.280.358.000 | 1.117.604.452 | 87,29 | 2 pasar | 2 pasar | 100 |
| 5 | Pasar | 7.254.000.000 | 6.782.316.748 | 93,50 | 2 pasar | 2 pasar | 100 |
| 6 | Pembangunan Pasar Rakyat | 1.200.000.000 | 971.424.426 | 80,95 | 1 Pasar | 1 Pasar | 100 |

d. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang

menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 80,33%, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau . Berdasarkan Perbup No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain :

- Sulitnya pemenuhan data kebutuhan masyarakat yang ada pada Bidang Bina Usaha Perdagangan yang mencakup seluruh kebutuhan pokok yang ada dan digunakan oleh masyarakat Kabupaten Berau. Salah satu contohnya adalah data Beras, Diskoperindag Kabupaten Berau hanya mempunyai data beras yang berasal dari luar daerah Kabupaten Berau saja, dan tidak mempunyai data beras yang beredar di pasaran yang berasal dari dalam daerah Kabupaten Berau itu sendiri. Hal ini berlaku juga untuk barang-barang kebutuhan pokok yang lainnya. Sehingga presentase pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tidak dapat dihitung;
- Data Ekspor yang ada di Diskoperindag Kabupaten Berau dalam hal ini Bidang Bina Usaha Perdagangan hanya meliputi dana Ekspor yang berasal dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Data ini hanya mewakili sekitar 60% data ekspor yang sesungguhnya ada di Kabupaten Berau. Selain itu, data SKA sebagian besar adalah data ekspor Migas. Sehingga tidak valid untuk digunakan sebagai perhitungan target capaian kinerja sektor Ekspor Kabupaten Berau apabila target kinerja yang diminta adalah data ekspor non migas;
- Tidak terpenuhinya target persiapan Gedung UPTD Metrologi pada tahun 2018 mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan Kemetrologian
- Tidak tersedianya dana Bimbingan Teknis bagi pelaksana di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengakibatkan minimnya kegiatan peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia, sementara kebutuhan akan

bimbingan dan semakin cepatnya pembaharuan informasi tidak dapat di atasi.

- Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan pada Subbag Penyusunan Program dan urusan Perkoperasian, Perdagangan serta Perindustrian menghambat pencapaian kinerja yang diharapkan.
- Kurangnya dukungan dana untuk melaksanakan inovasi-inovasi yang di rencanakan, serta dalam hal peningkatan sarana pelayanan public
- Pagu anggaran setiap tahun masih sangat minim

b. Solusi

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau ada beberapa solusi yang dijabarkan sebagai berikut :

- Data Ekspor dapat dipenuhi apabila data yang dicantumkan tidak terbatas pada non migas, karena Ekspor yang tercapat melalui Surat Keterangan Asal (SKA) sebagian besar merupakan data Ekspor MIGAS.
- Target kinerja untuk menghitung pencapaian keberhasilan disektor wirausaha, sebaiknya menggunakan perhitungan yang lebih dapat dihitung, seperti pengukuran keberhasilan wirausaha berdasarkan omset yang dihasilkan, lapangan kerja yang disediakan, jumlah tenaga kerja yang terserap dsb.
 - o Pada tahun 2019, Kegiatan Operasional dan Administratif pada UPTD Metrologi Legal dilakukan di bangunan sementara yang bersifat kontrak / sewa melalu APBD Kabupaten Berau.
- Diperlukan dukungan dana dalam peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan teknis
- Diperlukan tambahan SDM dengan keahlian yang sesuai untuk menungjang kinerja OPD
- Agar inovasi layanan dapat berjalan maksimal perlu disediakan anggaran yang memadai sesuai peruntukannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak.

- Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau mohon untuk dapat di prioritaskan pagu anggaran yang memadai setiap tahunnya.

3.2 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau berdasarkan Indikator Kinerja Utama menunjukkan hasil yang memuaskan. Data menunjukkan penambahan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang dikembangkan melalui pembinaan, pemantauan dan pelatihan naik sebesar 11,47 % (102 IKM) dibanding angka tahun 2018 yaitu 889 IKM. Sehingga Jumlah total IKM yang dikembangkan untuk tahun 2019 adalah sebanyak 991 IKM.

Hal yang sama juga dapat dilihat pada pencapaian target kinerja IKM yang menggunakan teknologi Industri Pada tahun 2018 jumlah IKM yang terdata menggunakan teknologi industri adalah sebanyak 472 IKM, sedangkan untuk tahun 2019, jumlah IKM yang menggunakan teknologi industri naik menjadi 496 IKM.

Dalam mengukur pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menggunakan angka besaran total ekspor non migas sebagai ukuran capaian kinerja. Pada Tahun 2018, total ekspor non migas Kabupaten Berau adalah sebesar 1.740.011.215,35 USD, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,05 % menjadi 1.727.740.126,32 USD sebagaimana terinci dalam laporan Pembangunan Daerah (LPPD) Kabupaten Berau tahun 2019.

Selanjutnya untuk perhitungan kontribusi PDRB dari sector perdangan, capaian kinerja pada Indikator kinerja utama Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan didasarkan pada hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, mengingat data yang diperlukan dalam perhitungan PDRB sangat kompleks. Data BPS pada tahun 2018 untuk kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 3,92% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 4,2%.

Dari sisi Koperasi dan UKM, pencapaian target kinerja Dinas Koperasi dihitung berdasarkan jumlah UKM yang memiliki keunggulan kompetitif. Pada tahun 2018 jumlah UKM yang terdata memiliki keunggulan kompetitif adalah sebesar 201 UKM dan

meningkatkan menjadi 237 UKM pada tahun 2019. Selain itu diukur pula capaian kinerja berdasarkan jumlah UMKM yang diberikan pembinaan serta bantuan permodalan. Pada tahun 2018, jumlah UMKM yang terdata telah mendapatkan binaan pelatihan berjumlah 48 UMKM, dan meningkat 100% selama tahun 2019 menjadi 96 UMKM.

Realisasi pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2018 dan tahun 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.16
REALISASI UKURAN KINERJA
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BERAU

TAHUN 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | ALASAN | PENJELASAN / PERHITUNGAN | REALISASI S/D TAHUN 2018 | REALISASI KINERJA TAHUN 2019 | SUMBER DATA |
|----|---|--|--------|---|--|--------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang di kembangkan | IKM | Mengukur perkembangan industri berbasis sumber daya local | IKM didapat dari update data jumlah IKM yang terdaftar setiap tahun | 889 IKM | 991 IKM | OPD |
| | | Jumlah IKM yang Menggunakan Teknologi Industri | IKM | Mengukur perkembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | IKM didapat dari update data jumlah IKM yang terdata menggunakan teknologi industri setiap tahun | 472 IKM | 496 IKM | OPD |
| 2 | Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat | USD | Mengukur peningkatan aktifitas perdagangan | Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Berau | 1.740.011.215,35 | 1.727.740.126,32 | OPD |
| | | PDRB Kab. Berau dari Sektor Perdagangan | % | Mengukur peningkatan aktifitas perdagangan | Peningkatan Nilai Kontribusi sektor perdagangan | 3,92 | 4,2 | BPS |
| 3 | Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah | Jumlah Wira Usaha yang Memiliki Keunggulan Kompetitif (UMKM) | Nilai | mengukur Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi | jumlah didapat dari data wirausaha yang memiliki keunggulan kompetitif setiap tahun | 201 UMKM | 237 UMKM | OPD |
| | | Jumlah UMKM yang dibina (UMKM) | Nilai | Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM | jumlah di dapat dari data UMKM yang diberi bantuan dan binaan modal setiap tahun | 48 UMKM | 96 UMKM | OPD |

Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2019 berdasarkan target capaian pada Perjanjian kinerja yang dibuat pada awal tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
REALISASI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BERAU
TAHUN 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | Target | Realisasi |
|----|---|--|--------|---------|-----------|
| 1 | Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang di kembangkan | IKM | 900 IKM | 991 IKM |
| | | Jumlah IKM yang Menggunakan Teknologi Industri | IKM | 480 IKM | 496 IKM |
| | | Jumlah Industri Kreatif | IKM | 140 | 154 |
| 2 | Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat | USD | 160 | 172,77 |
| | | PDRB Kab. Berau dari Sektor Perdagangan | % | 4,0 | 4,2 |
| 3 | Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah | Jumlah Wira Usaha yang Memiliki Keunggulan Kompetitif (UMKM) | UMKM | 230 | 237 |
| | | Jumlah UMKM yang dibina (UMKM) | UMKM | 90 | 96 |
| | | Jumlah Koperasi Berprestasi | Kop | 40 | 46 |

Sumber Data : Diskoperindag Kab. Berau, BPS Kab. Berau

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 telah tercapai sepenuhnya. Meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan senantiasa memberikan kinerja dan usaha terbaik yang dapat dilakukan guna tercapainya target kinerja program dan kegiatan yang telah di rancang bersama.

3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kata efisiensi umumnya berkaitan dengan minimnya sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila ada perbaikan dalam prosesnya, bisa dari segi lebih cepat atau lebih murah. Efisiensi dapat pula ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang waktu, biaya serta tenaga.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2019 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 21.229.567.800,00 yang terbagi dalam 12 (sebelas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan. Secara terperinci, efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Tidak Langsung

Anggaran belanja langsung merupakan anggaran belanja untuk pembiayaan pegawai yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Berau. Efisiensi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun 2019

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | Sisa Dana |
|-----|----------|----------|-----------|---|-----------|
| | | Rp | Rp | % | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---------------|-------|----------------|
| 1 | Total Belanja Tidak langsung (BTL) | 7.832.550.000,00 | 7.180.978.165 | 91,68 | 651.571.835,00 |
|---|------------------------------------|------------------|---------------|-------|----------------|

b. Anggaran Belanja Langsung

b.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. 1.553.339.800,- dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp.1.486.286.056,00 dengan persentase 95,68%, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal dinas dengan sasaran strategis tersedianya data pegawai dan data aset. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal dinas yang dapat dilihat pada tabel 3.18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut:

Tabel 3.18

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | Sisa Dana |
|-----|---|-------------|-------------|-------|------------|
| | | Rp | Rp | % | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 3.500.000 | 2.967.500 | 84,79 | 532.500 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 161.500.000 | 153.475.476 | 95,03 | 8.024.524 |
| 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan | 116.043.800 | 97.973.211 | 84,43 | 18.070.589 |

| | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------|-----------|
| | perijinan kendaraan dinas/operasional | | | | |
| 4 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 174.156.000 | 166.776.000 | 95,76 | 7.380.000 |
| 5 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 8.500.000 | 7.630.000 | 89,77 | 870.000 |
| 6 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 10.000.000 | 9.999.500 | 100 | 500 |
| | Penyediaan alat tulis kantor | 22.500.000 | 22.499.000 | 100 | 1.000 |
| 8 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 15.000.000 | 14.997.600 | 99,98 | 3.400 |
| 9 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4.000.000 | 2.719.000 | 67,98 | 1.281.000 |
| 10 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 20.000.000 | 17.350.000 | 86,75 | 2.650.000 |
| 11 | Penyediaan Perlengkapan rumah tangga | 5.600.000 | 5.298.000 | 94,61 | 302.000 |
| 11 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan | 8.000.000 | 7.920.000 | 99,00 | 80.000 |

| | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------|------------|
| | perundang-undangan | | | | |
| 12 | Penyediaan makanan dan minuman | 31.000.000 | 25.653.000 | 82,75 | 5.347.000 |
| 13 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 300.000.000 | 298.576.319 | 99,53 | 1.423.681 |
| 14 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 100.000.000 | 93.200.000 | 93,20 | 6.800.000 |
| 15 | Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran | 573.540.000 | 559.250.950 | 97,51 | 14.289.050 |

b.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp. 182.634.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 174.946.016,00 dengan persentase 95,79%, yang bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan, perencanaan program, pelaporan dengan output yang dihasilkan terdiri dari Renja 2019, RKA, DPA, LKj-IP, LPPD, dan Perjanjian Kinerja.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan program dan pelaporan capaian kinerja yang berkualitas dengan manfaat yang diperoleh terpenuhinya dokumen perencanaan program dan pelaporan capaian

kinerja sehingga tersedianya laporan dan realisasi SKPD yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.18 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | Sisa Dana |
|-----|--|-------------|-------------|-------|-----------|
| | | Rp | Rp | % | |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5.000.000 | 4.975.500 | 99,51 | 24.500 |
| 2 | Konsolidasi perencanaan Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan | 157.634.000 | 149.970.516 | 95,14 | 8.024.524 |
| 3 | Sosialisasi Kinerja Program OPD | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 | 0 |

b.3 Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Konduksif

Pelaksanaan Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang konduksif yang dianggarkan sebesar Rp. 116.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.113.396.860,00 dengan persentase 97,76 %, Target kinerja kegiatan ini adalah memberikan fasilitas kepada 60 UKM yang ada di Kabupaten Berau untuk kemudahan pembuatan Izin Usaha.

Sampai dengan 31 Desember 2019 target tersebut tercapai sebesar 112%. Sosialisasi dilakukan ke 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Pulau Derawan, Sambaliung dan Gunung Tabur, dimana masing-masing Kecamatan dihadiri oleh sedikitnya 20 UMKM yang ada, sehingga total UMKM yang difasilitasi

adalah 132 UMKM. yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.19 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif sebagai berikut :

Tabel 3.19
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | Sisa Dana |
|-----|---|-------------|-------------|-------|-----------|
| | | Rp | Rp | % | |
| 1 | Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah | 116.000.000 | 113.396.860 | 97,76 | 2.603.140 |

b.4 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang dianggarkan sebesar Rp.590.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.536.156.929,00 dengan persentase 90,87% yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang terfokus pada pelatihan Wirausaha dan Pembentukan Badan Usaha, mulai dari Perencanaan, Akses Permodalan, Pembuatan Proposal Permodalan, Prosedur dan Tata Kerja Administrasi dan Akuntansi Wirausaha dll. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal bulan Maret 2019 di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, Jalan Murjani I Tanjung Redeb.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 24 UKM di Kabupaten Berau, dan target tersebut tercapai sepenuhnya (100%) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.19 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | Sisa Dana |
|-----|---|-------------|-------------|-------|------------|
| | | Rp | Rp | % | |
| 1 | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan | 590.000.000 | 536.156.929 | 90,87 | 53.843.071 |

b.5 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang dianggarkan sebesar Rp.316.500.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.110.694.636,00 dengan persentase 34,97% yang bertujuan untuk memberikan dukungan pendanaan/modal dan sarana promosi bagi UMKM di Kabupaten Berau. Dengan target capaian sebanyak 100 UMKM Kegiatan ini mencapai 94%.

Program ini mencakup 3 kegiatan yang saling mendukung dan bersinergi guna mewujudkan pencapaian target kinerja yang diinginkan. Kegiatan ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.20 Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | Sisa Dana |
|-----|----------|----------|-----------|---|-----------|
| | | Rp | Rp | % | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|------------|-------|-------------|
| 1 | Pemantauan Pengelolaan dana Pemerintah Bagi UMKM | 50.000.000 | 27.112.330 | 54,22 | 22.887.670 |
| 2 | Penyelenggaraan promosi Produk UMKM | 66.500.000 | 66.377.801 | 99,82 | 112.119 |
| 3 | Pengembangan UMKM | 200.000.000 | 17.204.505 | 8,60 | 182.795.495 |

b.6 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.320.454.000,00 dengan persentase 71,21% yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Lembaga koperasi di Kabupaten Berau melalui pencapaian RAT koperasi Dengan target capaian sebanyak 76 koperasi.

Adapun sasaran pada program ini adalah meningkatkan angka koperasi yang berhasil RAT pada akhir tahun 2019, dari 80 koperasi yang ditargetkan RAT, angka yang di capai pada akhir tahun adalah sebanyak 76 koperasi. Capaian kinerja program ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi sebagai berikut :

Tabel 3.21
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | Sisa Dana |
|-----|----------|----------|-----------|---|--------------|
| | | Rp | Rp | % | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------|-------------|
| 1 | Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian | 100.000.000 | 78.122.250 | 78,12 | 21.877.750 |
| 2 | Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi | 350.000.000 | 242.331.750 | 69,24 | 107.668.250 |

B.7 Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan yang dianggarkan sebesar Rp.295.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.210.989.993,00 dengan persentase 71,52% yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang terhadap 1.440 alat UTP. Kegiatan ini mencapai lebih dari 100% dengan pelaksanaan tera dan tera ulang yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai lebih dari 1.440 alat UTP yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.9 Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 3.22

Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | Sisa Dana |
|-----|----------|----------|-----------|---|-----------|
| | | Rp | Rp | % | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------|------------|
| 1 | Operasionaslisasi dan pengembangan UPTD Kemetrollogian Daerah | 295.000.000 | 210.989.993 | 71,52 | 84.010.007 |
|---|---|-------------|-------------|-------|------------|

b.8 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor yang dianggarkan sebesar Rp.87.984.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.81.229.414,00 dengan persentase 92,32% yang bertujuan untuk meningkatkan angka ekspor komoditas dan meningkatkan angka investasi yang ditanamkan di Kabupaten Berau.

Sasaran dari program ini adalah terselesaikannya laporan PEPIDA dan terlaksananya Forum Komunikasi SKA bidang perdagangan luar negeri. Kedua sasaran yang diakomodir dalam dua kegiatan ini terlaksana seluruhnya (100%) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.23 Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 3.23

Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | Sisa Dana |
|-----|---|------------|------------|-------|-----------|
| | | Rp | Rp | % | |
| 1 | Forum Komunikasi SKA bidang perdagangan luar negeri | 87.984.000 | 81.229.414 | 92,32 | 3.973.993 |

b.9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang dianggarkan sebesar Rp.16.478.119.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.13.002.082.654,00 dengan persentase 78,91% yang bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan pada sarana perdagangan di Kabupaten Berau. Sasaran dari program ini adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana di pasar-pasar pada 13 Kecamatan di Kabupaten Berau, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.24 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri sebagai berikut :

Tabel 3.24
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | Sisa Dana |
|-----|---|---------------|---------------|-------|---------------|
| | | Rp | Rp | % | |
| 1 | Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk (DAK) | 4.481.811.000 | 3.897.147.414 | 86,95 | 494.663.586 |
| 2 | Pelaksanaan Pasar Murah | 2.100.000.000 | 99.856.885 | 4,76 | 2.000.143.115 |
| 3 | Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan | 161.950.000 | 133.732.729 | 82,58 | 28.217.271 |
| 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar | 1.280.358.000 | 1.117.604.452 | 87,29 | 162.753.548 |
| 5 | Operasional Pasar | 7.254.000.000 | 6.782.316.748 | 93,50 | 471.683.252 |
| 6 | Pembangunan Pasar Rakyat | 1.200.000.000 | 971.424.426 | 80,95 | 228.575.574 |

b.9 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah yang dianggarkan sebesar Rp.865.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.730.894.712,00

dengan persentase 84,50% yang bertujuan untuk kualitas dan daya saing Industri kecil dan Industri menengah yang ada di Kabupaten Berau. Sasaran dari program ini adalah terlaksananya fasilitasi bagi industri kecil menengah dalam promosi produk dan peningkatan daya saing yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.25 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | Sisa Dana |
|-----|--|-------------|-------------|-------|---------------|
| | | Rp | Rp | % | |
| 1 | Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya | 150.000.000 | 129.781.216 | 86,52 | 494.663.586 |
| 2 | Fasilitasi Dekranasda | 600.000.000 | 541.938.496 | 90,32 | 2.000.143.115 |
| 3 | Fasilitasi Sertifikasi Halal | 115.000.000 | 59.175.000 | 51,46 | 28.217.271 |

b.10 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang dianggarkan sebesar Rp.290.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.286.875.100,00 dengan persentase 98,92% yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung peningkatan pemasaran bagi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Berau. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kemampuan IKM binaan dalam penggunaan teknologi industri, serta Kemasan yang memadai dan menunjang kegiatan pemasaran industri kecil menengah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.26 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri sebagai berikut :

Tabel 3.26
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | Sisa Dana |
|-----|--|-------------|-------------|-------|-----------|
| | | Rp | Rp | % | |
| 1 | Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri | 290.000.000 | 286.875.100 | 98,92 | 3.124.900 |

C. Sumber Daya Manusia

Adapun Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 67 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, terdiri dari SD sebanyak 6 orang, SLTP sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 26 Orang, DIPLOMA II/III (D-2 / D-3) sebanyak 5 orang, STRATA 1 sebanyak 25 orang, STRATA 2 sebanyak 3 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | SD | 6 |
| 2 | SLTP | 2 |
| 3 | SLTA | 26 |
| 3 | DIPLOMA II/III (D-2 / D-3) | 5 |
| 4 | STRATA 1 | 25 |
| 5 | STRATA 2 | 3 |

| | | |
|---|---------------|-----------|
| 6 | STRATA 3 | 0 |
| | JUMLAH | 67 |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Diskoperindag Kab. Berau

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau. Akan tetapi, pada bidang Bina Usaha Perdagangan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada UPTD Metrologi dan lain-lain dalam layanan lingkup koperindag disamping melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun fungsional.

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.28

**Daftar Pangkat dan Golongan
Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau
Tahun 2019**

| NO | Pangkat / Golongan | JUMLAH |
|----|-------------------------|--------|
| 1 | Juru Muda/IA | 0 |
| 2 | Juru Muda TK. I/IB | 0 |
| 3 | Juru/IC | 5 |
| 4 | Juru TK. I/ID | 1 |
| 5 | Pengatur Muda/IIA | 2 |
| 6 | Pengatur Muda TK. I/IIB | 3 |
| 7 | Pengatur/IIC | 8 |
| 8 | Pengatur TK. I/IID | 7 |
| 9 | Penata Muda/IIIA | 8 |

| | | |
|----|-------------------------|-----------|
| 10 | Penata Muda TK. I/IIIB | 10 |
| 11 | Penata /IIIC | 4 |
| 12 | Penata TK. I/IIID | 12 |
| 13 | Pembina /IVA | 4 |
| 14 | Pembina TK I/IVB | 2 |
| 15 | Pembina Utama Muda/IVC | 1 |
| 16 | Pembina Utama Madya/IVD | 0 |
| 17 | Pembina Utama/IVE | 0 |
| | JUMLAH | 67 |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Diskoperindag Kab. Berau

Sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, tercatat 51,02% pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau adalah golongan III, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 1 dan SLTA. Jumlah pegawai golongan I dan II dengan latar belakang Pendidikan SD dan SLTP masih cukup besar yaitu 38,24% dari total 67 pegawai. Oleh karna itu Diskoperindag perlu terus melakukan pembelajaran dan bimbingan bagi pegawai untuk dapat mengatasi kemajuan teknologi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.29

Daftar Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2019

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---------------------------|-----------|
| 1 | Pejabat Struktural | 23 |
| 2 | Pejabat Fungsional | 2 |
| | JUMLAH | 25 |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Diskoperindag Kab. Berau

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan juga dari segi tingkat pendidikan belum cukup komposisi perbandingan antara sarjana dengan non sarjana untuk mengisi jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau belum dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau terdiri dari ruangan Kepala Dinas, ruangan Sekretaris, ruangan sekretariat, ruangan Penyusunan Program dan Pelaporan, ruang arsip, ruang rapat staf, ruang pertemuan, ruangan bidang Bina Usaha Perdagangan, ruangan Bidang Sarana Perdagangan, ruangan Bidang Industri, ruangan Bidang Koperasi dan UMKM, ruangan pelayanan umum, ruangan Keuangan, ruang laktasi, Gudang dan dapur. Saat ini tidak ada barang yang baik tetapi tidak digunakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 3.30 dibawah ini :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Sarana dan prasarana yang perlu ditambahkan | Keterangan |
|----|----------------------|--------|---|------------|
| 1 | Kendaraan Roda 4 | 4 | 2 mobil box untuk sarana Pasar murah | |

| | | | | |
|----|---------------------------|-----|--|--|
| 2 | Kendaraan Roda 2 | 22 | 8 Kendaraan roda 2 untuk Kasi/ Kasubbag dan Ka. UPTD | |
| 3 | Gedung Kantor | 1 | 1 Gedung khusus untuk sarana Metrologi | |
| 4 | Kursi | 193 | - | |
| 5 | Meja | 186 | - | |
| 6 | Komputer PC | 19 | 10 Komputer PC untuk penunjang kegiatan Sekretariat dan Bidang Pelayanan | |
| 7 | Printer | 17 | 6 printer scanner untuk penunjang kegiatan sekretariat dan bidang | |
| 8 | Note Book / Laptop | 24 | 6 laptop untuk operator dan pelaksana di bidang teknis | |
| 9 | Air Conditioner | 21 | | |
| 10 | Papan Struktur Organisasi | 1 | | |
| 11 | Papan Pengumuman | 1 | | |
| 12 | UPS | 2 | | |
| 13 | Lemari Arsip | 4 | 2 buah lemari arsip dengan box arsip | |
| 14 | Brankas | 1 | - | |
| 15 | Mesin Ketik Manual | 3 | - | |
| 16 | Wireless | 2 | - | |

| | | | | |
|----|-------------------|---|--|--|
| 17 | Mesin Foto Kopi | 0 | 2 Buah mesin fotokopi | |
| 18 | Televisi | 4 | | |
| 19 | Dispenser | 6 | 2 buah dispenser dan kulkas untuk ruang tunggu pelayanan dan ruang laktasi | |
| 20 | Infocus/Proyektor | 2 | | |

BAB IV

PENUTUP

c. Kesimpulan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 80,33%, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau . Berdasarkan Perbup No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain :

- Sulitnya pemenuhan data kebutuhan masyarakat yang ada pada Bidang Bina Usaha Perdagangan yang mencakup seluruh kebutuhan pokok yang ada dan digunakan oleh masyarakat Kabupaten Berau. Salah satu contohnya adalah data Beras, Diskoperindag Kabupaten Berau hanya mempunyai data beras yang berasal dari luar daerah Kabupaten Berau saja, dan tidak mempunyai data beras yang beredar di pasaran yang berasal dari dalam daerah Kabupaten Berau itu sendiri. Hal ini berlaku juga untuk barang-barang kebutuhan pokok yang lainnya. Sehingga presentase pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tidak dapat dihitung;
- Data Ekspor yang ada di Diskoperindag Kabupaten Berau dalam hal ini Bidang Bina Usaha Perdagangan hanya meliputi dana Ekspor yang berasal dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Data ini hanya mewakili sekitar 60% data ekspor yang sesungguhnya ada di Kabupaten Berau. Selain itu, data SKA

sebagian besar adalah data ekspor Migas. Sehingga tidak valid untuk digunakan sebagai perhitungan target capaian kinerja sektor Ekspor Kabupaten Berau apabila target kinerja yang diminta adalah data ekspor non migas;

- Tidak terpenuhinya target persiapan Gedung UPTD Metrologi pada tahun 2018 mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan Kemetrolgian
- Tidak tersedianya dana Bimbingan Teknis bagi pelaksana di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengakibatkan minimnya kegiatan peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia, sementara kebutuhan akan bimbingan dan semakin cepatnya pembaharuan informasi tidak dapat di atasi.
- Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan pada Subbag Penyusunan Program dan urusan Perkoperasian, Perdagangan serta Perindustrian menghambat pencapaian kinerja yang diharapkan.
- Kurangnya dukungan dana untuk melaksanakan inovasi-inovasi yang di rencanakan, serta dalam hal peningkatan sarana pelayanan public
- Pagu anggaran setiap tahun masih sangat minim

d. Saran

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau ada beberapa solusi yang dijabarkan sebagai berikut :

- Data Ekspor dapat dipenuhi apabila data yang dicantumkan tidak terbatas pada non migas, karena Ekspor yang tercapat melalui Surat Keterangan Asal (SKA) sebagian besar merupakan data Ekspor MIGAS.
- Target kinerja untuk menghitung pencapaian keberhasilan disektor wirausaha, sebaiknya menggunakan perhitungan yang lebih dapat dihitung, seperti pengukuran keberhasilan wirausaha berdasarkan omset yang dihasilkan, lapangan kerja yang disediakan, jumlah tenaga kerja yang terserap dsb.

- Pada tahun 2019, Kegiatan Operasional dan Administratif pada UPTD Metrologi Legal dilakukan di bangunan sementara yang bersifat kontrak / sewa melalui APBD Kabupaten Berau.
- Diperlukan dukungan dana dalam peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan teknis
- Diperlukan tambahan SDM dengan keahlian yang sesuai untuk menunjang kinerja OPD
- Agar inovasi layanan dapat berjalan maksimal perlu disediakan anggaran yang memadai sesuai peruntukannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
- Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau mohon untuk dapat di prioritaskan pagu anggaran yang memadai setiap tahunnya.

Lampiran 1

Evaluasi Renja 2019

Lampiran 2

Rencana Aksi

Lampiran 3

Dokumen Evaluasi terhadap Rencana Aksi

Lampiran 4

Perjanjian Kinerja

Lampiran 5

Rencana Kinerja Tahunan

